

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, hampir semua kalangan sepakat dan telah menjadi pengetahuan umum, khususnya dikalangan akademisi PKn, bahwa “tujuan dari PKn (*civic education* dan *citizenship education*) adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*)” (Cogan, 1999: 4; Wahab dan Sapriya, 2011: 10). Kemudian Soemantri (2001: 279) menyatakan bahwa tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan PKn adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Menurut Maftuh dan Sapriya (2005: 30), bahwa tujuan negara mengembangkan PKn, agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa PKn merupakan *conditio sine qua non* dalam pendidikan nasional Indonesia. Keniscayaan PKn sebagai usaha mempersiapkan dan pembentukan warga negara yang baik dan cerdas ini dapat dibuktikan dari komitmen pemerintah, para akademisi, dan praktisi PKn yang tertuang di dalam dokumen formal kenegaraan baik secara prosedural maupun secara praksisnya. Di samping itu, di dalam paradigma baru PKn yang telah dikonsepsikan dan dikembangkan oleh para akademisi dan praktisi PKn, hakekat, visi, misi serta tujuan PKn dapat membuktikan betapa pentingnya PKn bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Winataputra (2001: 288-335) dalam disertasinya dan Sukadi (2010: 2) pada hasil penelitiannya, bahwa hakikat PKn dalam paradigma barunya adalah sebagai berikut:

Pertama, PKn adalah *program pendidikan* yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam konteks pendidikan formal maupun non-formal di Indonesia. *Kedua*, PKn adalah *bidang kajian ilmiah* bersifat multidimensi yang mengintegrasikan fungsi pendidikan politik dan pemerintahan; pendidikan hukum dan norma-norma; pendidikan nilai, moral, dan budi pekerti; pendidikan ideologi; dan pendidikan sosial pada umumnya. *Ketiga*, PKn adalah *program aksi sosio-kultural masyarakat* yakni sebagai pendidikan partisipasi aktif warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Winataputra (2001: 294-297) juga menjelaskan bahwa PKn mengemban visi sebagai berikut:

Pertama, PKn mengemban visi sebagai program pendidikan tentang, melalui, dan untuk kewarganegaraan (*education about, through, and for citizenship*). *Kedua*, PKn juga diharapkan dapat menjadi wahana pendidikan demokrasi yang mampu menciptakan dan mewujudkan belajar demokrasi, dalam demokrasi, dan untuk demokrasi (*learning democracy, in democracy, and for democracy*) bagi setiap insan warga masyarakat dan warga negara. *Ketiga*, visi PKn seperti ini diarahkan dalam usaha menciptakan dan mewujudkan visinya sebagai pendidikan untuk membangun karakter bangsa (*nation and character building*).

Hal ini memberikan penjelasan kepada kita, bahwa pentingnya PKn di Indonesia yakni untuk mewujudkan warga negaranya agar mampu “berpikir global, bertindak lokal, dan komit terhadap bangsa dan negaranya (*think globally, act locally, and commit nationally*)” (Somantri, 2001; Wahab, 2001; Winataputra, 2001; Sukadi 2010; Wahab dan Sapriya, 2011).

Berdasarkan uraian hakikat dan visi PKn di atas, Winataputra (2001: 288-335) dan Sukadi (2010: 6) menjelaskan, bahwa PKn memiliki misi *sosio-paedagogis, sosio-akademis, dan sosio-kultural*” yakni sebagai berikut:

Dengan misi *sosio-paedagogis* PKn berkewajiban memberdayakan peserta didik melalui proses-proses pendidikan, pengajaran, dan pelatihan untuk memiliki tujuh kecakapan kewarganegaraan yang meliputi: *civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence, dan civic culture* yang terintegrasi dalam

kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis. Dengan misi *sosio-akademis* PKn haruslah dapat berfungsi bagi peserta didik untuk bersama-sama secara akademis mengembangkan kehidupan kewarganegaraan dan berdemokrasi yang lebih baik melalui berbagai kegiatan berpikir dan inkuiri reflektif terhadap berbagai masalah kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKn dalam hal ini hendanya dapat menjadi sarana rekonstruksi sosial atau melakukan rekayasa sosial bagi pendidik dan peserta didik dalam menerapkan prinsip berpikir dan penelitian ilmiah terutama menciptakan dan mengembangkan kehidupan kewarganegaraan yang demokratis dan berkarakter yang lebih baik sesuai tahap-tahap perkembangan berpikir sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dengan misi *sosio-kultural*, akhirnya, PKn haruslah dapat berfungsi bagi pendidik dan peserta didik untuk secara bersama-sama mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini PKn harus dapat menjadi wahana partisipasi sosial politik kewarganegaraan bagi pendidik dan peserta didik kepada kepentingan bersama sebagai warganegara dalam kehidupan demokratis menuju tujuan nasional negara Indonesia yang selalu mengarah kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang lebih baik berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Jika hakekat dan visi PKn di atas dapat menjadi pedoman yang riil dan dapat merealisasikan misi dan tugas-tugas PKn, tentu tidaklah begitu mustahil untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan PKn sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan dan sebagai wahana pendidikan demokrasi. Dalam hal ini, tujuan PKn adalah membangun dan memberdayakan warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizenship*), dalam artian: cerdas, beriman dan bertaqwa, bermoral dan berbudi pekerti luhur, demokratis, bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang kuat, serta partisipatif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam bahasa pendidikan, PKn adalah wahana pendidikan dalam rangka *nation and character building* yang memungkinkan setiap warga negara memiliki kecakapan-kecakapan dan kompetensi kewarganegaraan yang utuh dan powerful; menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*) yang meliputi: *civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidece, civic commitment, civic competence*; yang secara utuh dapat digunakan untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang bermoral dan bermartabat (*humanis, holistik, dan religius*) (Sukadi, 2010: 6).

Namun sayang, tujuan mulia di atas tidak diiringi oleh realitas pembelajaran dan hasil belajar PKn yang utuh dan powerful. Pembelajaran PKn yang umum dilakukan di sekolah kurang mengitergrasikan seluruh potensi dan dimensi kecerdasan manusia (intelektual, emosional, personal, sosial, moral, dan spiritual). Sedangkan secara substansial, negara keasatuan republik Indonesia membutuhkan warga negara yang memiliki kompetensi yang utuh dan terintegrasi ke dalam semua kompetensi kewarganegaraannya. Sukadi (2010: 4) menjelaskan kecenderungan pembelajaran PKn di Bali yang menunjukkan dominasi dan hegemoni praktik pendidikan nasional yang cenderung mengabaikan nilai-nilai holistik-humanis-religius, karena dikuasai oleh ideologi *pasar kapitalisme* yang cenderung menekankan pada cara pandang *rasionalisme-empirisme* atau *rasionalitis-materialistis*, sehingga roh pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual yang suci kian waktu cenderung menampilkan gejala sekulerisasi. Seperti yang diistilahkan oleh Kaelan (2003: 10) "...di sini dunia pendidikan nasional kita seperti dunia negara sekuler yang cenderung memisahkan antara kepentingan ideologi agama dan ideologi ilmu pengetahuan".

Sejalan dengan pemikiran di atas, upaya mengembangkan praktik pembelajaran PKn di sekolah juga perlu dilakukan melalui pemikiran yang lebih *holistik-humanis-religius* dan terintegrasi. Dilihat dari visinya, pembelajaran PKn ke depan tidaklah cukup membangun warganegara yang demokratis dan rasional saja seperti yang dilakukan di negara-negara barat. Pembelajaran PKn juga perlu mengembangkan visi *beriman, bermutu, dan berbudaya* sekaligus. Begitu pula dengan misinya, pembelajaran PKn tidaklah cukup mewujudkan misi *sosio-paedagogis* saja, melainkan juga secara terintegrasi perlu mewujudkan misi *sosio-akademis, sosio-kultural, dan sosio-religius* (Sukadi, 2010).

Namun realitanya, karakteristik pembelajaran PKn di Bali secara umum jika dilihat pada praktik pembelajaran yang ada di sekolah masih diwarnai oleh hal-hal berikut. *Pertama*, pembelajaran PKn masih dikuasai oleh ideologi pasar kapitalis yang cenderung *rasional-empiris-materialistis* yang menunjukkan telah terjadinya gejala sekulerisasi yang memisahkan antara urusan agama dengan negara atau urusan agama dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya yang

terjadi adalah roh pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai sosial-budaya (*lokal genius*) dengan nilai-nilai moral yang suci (*spiritual-religious*) itu semakin kering dalam dunia pendidikan (Sukadi, 2010: 6).

Kedua, metode, media, materi, sumber, dan evaluasi yang tergambar dari RPP dan silabus PKn kering dengan sentuhan nilai-nilai spritual-religius. *Ketiga*, dalam proses dan upaya pencapaian hasil belajar lebih cenderung meningkatkan kecerdasan intelektual yang *rasionalistik-empiris-materialistik*; terlihat dari aktivitas belajar di kelas yang cenderung hanya melibatkan aktivitas fisik dan kognisi tingkat rendah yang kering aktivitas mental yang berdimensi moralitas-spiritualitas-religius. *Keempat*, materi-materi pembelajaran PKn yang diberikan dan dipelajari oleh siswa hanya fokus mempelajari bagaimana hubungan warganegara dengan negara yang berpola barat sekuler; memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Kurang sekali sentuhan nilai-nilai holistik-humanis-religius yang bersumber dari kearifan lokal; budaya spiritual-religius masyarakat (Sukadi, 2010: 6). *Kelima*, pernyataan di atas didukung oleh beberapa hasil temuan penelitian bahwa pembelajaran PKn secara umum dilakukan pada sekolah-sekolah di Bali masih menggunakan pendekatan belajar yang konvensional dan mengabaikan aktifitas spiritual religius (Lasmawan: 2002: 4; Kertih, 2005: 86; dan Sukadi, 2010: 8)

Dilihat dari upaya inovasi pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam praktik pembelajaran PKn di sekolah, seperti yang diungkapkan oleh Djahiri (dalam Sukadi, 2010: 3):

Sebetulnya sudah dikembangkan dan digunakan model-model pembelajaran PKn seperti: *project citizen, cooperative learning, value clarification, value analysis, contextual teaching and learning, jurisprudential inquiry, portopolio based learning, problem-based learning, simulation, role playing, advanced organizer, social inquiry, discovery learning*, dan sejenisnya. Sayangnya inovasi yang dilakukan para pakar tidak terjamin kontinuitasnya oleh guru. Hal ini dinilai oleh sebagian para guru karena kurang berbasis pada pengembangan kearifan budaya lokal masyarakatnya. Inovasi yang dilakukan para pakar membuat guru asing dengan dunia profesi yang digelutinya sehari-hari dalam lingkungan sosial budaya masyarakatnya.

Kemudian Lasmawan (2002: 4) dalam penelitiannya menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran seperti di atas juga disebabkan karena “model pembelajaran yang dianut oleh guru didasarkan atas asumsi tersembunyi bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu pengetahuan yang bisa dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa (*one way method*) sehingga model pembelajaran konvensional masih tetap diterapkan”.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran dan kenyataan inilah yang memberikan inspirasi bagi peneliti untuk melakukan studi kuasi eksperimen terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA Negeri di kota Singaraja dengan penerapan pendekatan pembelajaran *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha*. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan pembelajaran PKN dengan kearifan lokal (*local genius*) berbasis pada nilai-nilai spiritual ajaran agama Hindu di Bali dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa atau tercapainya hasil belajar kewarganegaraan siswa yang utuh, yakni menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*) yang terintegrasi dalam *civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence*; yang secara utuh dapat digunakan untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang beriman, bertaqwa, bermoral, bermartabat, dan cerdas intelektual secara personal maupun sosial (humanis, holistik, dan religius).

Pendekatan belajar ini diterapkan pada pembelajaran PKN karena peneliti berkeyakinan bahwa agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang merupakan bagian dari peradaban manusia adalah bersifat kontinum. Keyakinan ini tidak terlepas dari adagiumnya Albert Einstein yang menyatakan “*science without religion is lame, religion without science is blind*” (Jammer, 1999: 11) yang maknanya adalah ilmu pengetahuan tanpa dilandasi oleh agama itu akan buta dan agama tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan itu akan lumpuh. Begitu juga Giroux (1981: 26) dan Young Pai (1990: 3) menyatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan budaya masyarakatnya, pendidikan juga dipengaruhi oleh *society’s prevailing worldview and values*”. Berdasarkan kutipan ini dapat dipahami bahwa pendidikan sebagai bagian

dari peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari konteks dan proses sosial budaya masyarakat yang melingkupinya, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Artinya, pendidikan dalam upayanya membentuk perilaku, menanamkan pengetahuan, proses berpikir, nilai-nilai, cara belajar, keterampilan kognitif dan sosial yang esensial, serta nilai-nilai kebenaran akan ditentukan juga oleh bagaimana pandangan masyarakatnya tentang dunia dan nilai-nilainya.

Subagia dan Wiratma (2005: 5); dan Sukadi (2010: 2) juga memberikan penguatan bahwa “hubungan yang erat antara pendidikan dengan budaya spiritual yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama masih sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat kita di dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikannya” termasuk tujuan PKN itu sendiri. Tujuan PKN ini disinergikan dengan nilai-nilai sosial budaya spiritual berbasis ajaran nilai-nilai agama, bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia sebagai warga negara yang seutuhnya dalam artian baik dan cerdas (*good and smart*) secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual dalam setiap dimensi hakekat kehidupannya (*mahluk mono-dualistis* dan *mono-pluralistis* yang holistik, humanis, dan religius) dan tidak mecabut generasi penerusnya dari akar budayanya sendiri.

Secara substansi, penelitian ini meyakini bahwa paradigma kearifan lokal (*local genius*) pandangan masyarakat Bali tentang belajar sebagai *Yadnya* atau ibadah yang diimplementasikan melalui penerapan pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dapat membentuk “**manusia Bali yang seutuhnya**” warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual dalam setiap dimensi hakikat kehidupannya (*mahluk mono-dualistis* dan *mono-pluralistis*; holistik-humanis-religius) yang mampu *think globally, act locally, and commit nationally* seperti yang telah dikonsepsikan oleh para akademisi dan praktisi PKN di Indonesia.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam mewujudkan hakekat, visi, misi, dan tujuan PKn, terutama dalam hal pembelajaran PKn yang semestinya dilakukan dalam dunia persekolahan untuk pencapaian kompetensi kewarganegaraan siswa yang utuh dan terintegrasi, yakni sebagai berikut;

1. Secara prosedural, PKn memiliki hakikat yang ideal, namun hakikat ini tidak dibarengi oleh pengimplementasian PKn yang sesuai dengan hakikat visi, misi, dan tujuan PKn yang telah digariskan kepadanya.
2. Pembelajaran PKn secara umum masih diwarnai oleh dominasi dan hegemoni praktik pendidikan nasional yang cenderung mengabaikan nilai-nilai *holistik-humanis-religius*, yang dikuasai oleh ideologi pasar kapitalisme yang cenderung menekankan pada cara pandang *rasionalisme-empirisme*, sehingga roh pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moral spiritual yang suci kian waktu cenderung menampilkan gejala sekulerisasi.
3. Upaya mengembangkan praktik pembelajaran PKn di sekolah juga perlu dilakukan melalui pemikiran yang lebih *holistik-humanis-religius* dan terintegrasi.
4. PKn ke depan tidaklah cukup membangun warganegara yang demokratis dan rasional saja seperti yang dilakukan di negara-negara barat. Namun PKn juga perlu mengembangkan visi beriman, bermutu, dan berbudaya sekaligus.
5. PKn tidaklah cukup mewujudkan misi *sosio-paedagogis saja*, melainkan juga secara terintegrasi perlu mewujudkan misi *sosio-akademis, sosio-kultural, dan sosio-religius*.
6. Karakteristik pembelajaran PKn di Bali secara umum, masih diwarnai oleh pembelajaran yang masih dikuasai oleh ideologi pasar kapitalis yang cenderung rasional-empiris-materialistis yang menunjukkan telah terjadinya gejala sekulerisasi yang memisahkan antara urusan agama dengan negara atau urusan agama dengan ilmu pengetahuan sehingga roh pendidikan

yang berlandaskan nilai-nilai sosial-budaya (*lokal genius*) dengan nilai-nilai moral yang suci semakin kering dalam PKn.

7. Metode, media, materi, sumber, dan evaluasi yang tergambar dari RPP dan silabus PKn kering dengan sentuhan nilai-nilai spritual-religius
8. Dalam proses dan upaya pencapaian hasil belajar lebih cenderung meningkatkan kecerdasan intelektual yang rasionalistik-empiris-materialistik; terlihat dari aktivitas belajar di kelas yang cenderung hanya melibatkan aktivitas fisik dan kognisi tingkat rendah yang kering aktivitas mental yang berdimensi moralitas-spiritualitas.
9. Materi-materi pembelajaran PKn yang diberikan dan dipelajari oleh siswa hanya fokus mempelajari bagaimana hubungan warganegara dengan negara yang berpola barat sekuler; kurang sekali sentuhan nilai-nilai *holistik-humanis-religius* yang bersumber dari kearifan lokal; budaya spiritual masyarakat Hindu Bali.
10. Pembelajaran PKn secara umum dilakukan pada sekolah-sekolah di Bali masih menggunakan pendekatan belajar yang konvensional. Hal ini dikarenakan oleh asumsi tersembunyi guru, bahwa PKn adalah suatu pengetahuan yang bisa dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa (*one way method*) sehingga model pembelajaran konvensional masih tetap diterapkan.

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian inilah yang memberikan inspirasi kepada peneliti untuk melakukan studi kuasi eksperimen terhadap peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA Negeri di kota Singaraja dengan penerapan pendekatan pembelajaran *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha*” dengan fokus permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa dengan penerapan pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dibandingkan dengan penerapan pendekatan belajar PKn konvensional?

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada peningkatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa dengan penerapan pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dibandingkan dengan penerapan pendekatan belajar PKn konvensional?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada peningkatan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa dengan penerapan pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dibandingkan dengan penerapan pendekatan belajar konvensional?
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada peningkatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa dengan menggunakan pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dibandingkan dengan penerapan pendekatan belajar PKn konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas dapatlah difokuskan tujuan penelitian kuasi eksperimen ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pada peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa dengan penerapan pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dibandingkan dengan penerapan pendekatan belajar PKn konvensional?
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pada peningkatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa dengan penerapan pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dibandingkan dengan penerapan pendekatan belajar PKn konvensional?
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pada peningkatan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa dengan penerapan pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dibandingkan dengan penerapan pendekatan belajar PKn konvensional?
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pada peningkatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa dengan penerapan

pendekatan belajar *Catur Asrama* melalui taxonomi *Tri Kaya Parisudha* dibandingkan dengan penerapan pendekatan belajar PKn konvensional?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif, baik secara teoritis maupun praktis dalam Pendidikan Kewarganegaraan, terutama untuk tujuan kontinuitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di dalam usaha meningkatkan kompetensi kewarganegaraan yang utuh, *powerful*, multi dimensi, dan terintegrasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang positif sebagai;

1. Upaya mengembangkan konsep baru tentang inovasi pembelajaran PKn untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA.
2. Bentuk integrasi kearifan lokal masyarakat Hindu Bali dalam dunia pendidikan sekaligus sebagai usaha pelestarian terhadap simpul-simpul budaya lokal masyarakat Bali berbasis ajaran Hindu dalam gerakan politik identitas masyarakat Bali yakni dengan gerakan Ajeg Balinya.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif kepada;

1. Guru PKn, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam inovasi pembelajaran PKn yang kontekstual.
2. Siswa, bahwa hasil penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraannya terutama dalam hal mengintegrasikan kemampuan siswa dalam mengembangkan aspek rasionalitas dan kemampuan spiritualnya .
3. Peneliti, sebagai upaya untuk memahami, memecahkan masalah, dan kontinuitas dalam inovasi pembelajaran PKn.
4. Peneliti lain yang sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pedoman atau bahan kerangka pemikiran di dalam mengkaji persoalan yang sejenis dalam penelitiannya

F. Struktur Organisasi Tesis

Penelitian ini diawali dengan penulisan Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta mencantumkan struktur organisasi tesis. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II Kajian Pustaka, pada bagian ini dideskripsikan landasan teori dari variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini sebagai *grand theory* yang dipergunakan penulis di dalam membahas, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan yang sedang dikaji, kemudian mencantumkan juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih relevan sebagai acuan di dalam kontinuitas dan signifikansi dari penelitian ini untuk membentuk kerangka berpikir penelitian dan menyusun hipotesis penelitian.

Bagian ketiga dari struktur tesis ini yakni Bab III Metode Penelitian yang memuat lokasi dan subjek (populasi dan sampel) penelitian, desain penelitian dan metode penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data penelitian. Selanjutnya Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yakni yang memuat prosedur pelaksanaan eksperimen, deskripsi hasil temuan penelitian, pengujian hipotesis penelitian, dan dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian. Organisasi terakhir penelitian ini yakni Bab V Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.